

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Fernanda 2014)

Upaya yang perlu dilakukan untuk memwujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun komponen laporan keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan

Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan merupakan unsur penting dalam pemerintahan karena laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan merupakan unsur penting dalam pemerintahan karena laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai. laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila laporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, berarti pemerintah telah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Tuntutan perbaikan dalam laporan keuangan pemerintah harus dijawab dengan perbaikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan. Menurut Devi dalam Nurillah (2014) laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berperan penting pada organisasi pemerintah karena Laporan keuangan tersebut dibuat oleh sumber daya manusia itu sendiri. Sumber daya manusia adalah pengelola yang memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan adanya SDM yang kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh laporan keuangan daerah diantaranya dilakukan oleh Ropiyantie dalam Nurillah (2014) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, tentunya akan mampu mempengaruhi nilai informasi

akuntansi pada pelaporan keuangan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan didukung adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Di samping sumber daya manusia laporan keuangan yang berkualitas dapat pula dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi. hal ini senada dengan ungkapan oleh Rahadi (2007) menyatakan bahwa Teknologi Informasi mempunyai manfaat atau kemudahan bagi seseorang dalam menghemat waktu maupun tenaga. Sedangkan menurut Menurut Pramudiarta dalam Widjayanto (2001) Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan di dalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan. Dengan adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Dengan kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Menurut Jugiyanto (1995: 41) informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (ketepatan waktu) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Di masa sekarang ini apa lagi saat ini, tugas-tugas atau pekerjaan manusia dalam organisasi banyak yang telah digantikan oleh komputer termasuk dalam bidang akuntansi. Proses pengolahan data akuntansi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini karena kemampuan komputer dalam mengolah data yang jauh melebihi kecepatan manusia.

Dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat memudahkan berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Saat ini teknologi informasi berkembang sangat pesat sehingga dengan teknologi informasi ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik karena masih sedikit situs web pemerintah daerah yang *update* mengenai informasi keuangannya.

Laporan keuangan yang baik tidak dapat dipisahkan dari sumber daya manusia dan juga teknologi informasi, sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi informasi yang memadai, dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan karena pemrosesan dan penyimpanan data tidak membutuhkan waktu

yang lama untuk disajikan, karena semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan wawancara dengan pegawai yang bekerja di kantor dan badan kabupaten Bone Bolango salah satunya bapak Abdul (nama samaran) beliau mengatakan Masalah dalam sistem informasi manajemen daerah yang umumnya terjadi di lapangan adalah karena adanya perubahan kebijakan, sehingga sistem informasi manajemen daerah perlu diperbarui untuk disesuaikan dengan kebijakan tersebut. Misalnya minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi disetiap SKPD, sehingga perlu penyesuaian dan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan dan mempelajari sistem informasi manajemen daerah tersebut. Selain itu, masalah yang dihadapi yaitu kurangnya pemahaman penggunaan informasi teknologi oleh personil pegawai di setiap SKPD mengenai penggunaan sistem informasi manajemen daerah, sehingga pemanfaatan sistem informasi manajemen daerah belum dapat dimanfaatkan secara maksimal serta hanya dilakukan pelatihanya sekali dalam setahun.

Pada tahun anggaran 2013-2015 Kabupaten Bonebolango telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun berdasarkan Siaran Pers Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bone Bolango TA 2015 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo (<http://gorontalo.bpk.id>), masih ada beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal yang perlu mendapat perhatian, antara lain (1) pengelolaan dan pertanggungjawaban kas di bendahara Pengeluaran belum memadai; (2) Aset tanah belum disertai bukti kepemilikan dan

belum disajikan secara andal; (3) Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bone Bolango belum tertib; (4) bendahara terlambat menyetor sisa pajak.

Penelitian Pramudiarta (2015) pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah, Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Sedangkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi.

Penelitian Winidyaningrum (2010) pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening. Pengendalian intern akuntansi Hasil penelitian dalam model pertama dengan *path analysis* menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan melalui pengendalian intern akuntansi. Sedangkan hasil penelitian dalam model kedua dengan uji regresi menunjukkan adanya pengaruh positif tidak signifikan antara sumber daya manusia, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.

Penelitian mirnayanti (2013) pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap nilai informasi

pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil Penelitian pengendalian intern mempunyai pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sementara kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh. Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu lokasi dan sampel yang berbeda serta penelitian ini hanya berfokus di tiga variable saja yaitu Sumber daya manusia pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian Putri Rusmiadi (2015) pengaruh kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1)Kualitas Sumber Daya Manusia mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. 2) Sistem Pengendalian Internal mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pada Kabupaten Bonebolango**

1.2 Identifikasi Masalah:

Berdasarkan penjelasan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemanfaatan sistem informasi Manajemen daerah (SIMDA) yang kurang maksimal dalam menyusun laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta pelatihanya hanya dilakukan sekali dalam setahun.

2. Minimnya sumber daya manusia yang berlatar belakang akuntansi disetiap SKPD, sehingga perlu penyesuaian dan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan dan mempelajari sistem informasi manajemen daerah
3. Kabupaten Bone bolango Pada tahun 2013-2015 sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih ada temuan yang signifikan, yang menyebabkan kurangnya kualitas informasi laporan keuangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.3 Rumusan Masalah:

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.4 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

2. Untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia dan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone Bolango.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan tambahan pengetahuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dalam ilmu akuntansi khususnya sektor publik yang terkait dengan Kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi serta kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif terhadap ilmu pengetahuan serta sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan meneliti lebih lanjut khususnya mengenai topik sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan masukan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi yang selanjutnya dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan dalam memecahkan masalah dan pengambilan kebijakan bagi pimpinan Kabupaten Bone Bolango terkait dengan kualitas laporan keuangan, kualitas sumber daya manusia dan teknologi informasi.